

SIARAN PERS

KEBIJAKAN OJK MENJAGA SEKTOR JASA KEUANGAN SEMAKIN MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH

Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026

Jakarta, 5 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk terus menjaga sektor jasa keuangan (SJK) agar tetap *resilient* sehingga mampu berkontribusi lebih optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas di 2026 yaitu Penguatan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan, Pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan yang Kontributif dan Pendalaman Pasar Keuangan dan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan.

Demikian penyampaian Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyaasari Dewi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis.

“Kondisi fundamental perekonomian dan juga kinerja sektor jasa keuangan sangat solid menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan. Kami berterima kasih atas seluruh program-program prioritas pemerintah,” kata Friderica.

Hadir dalam pertemuan itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, pimpinan Kementerian/Lembaga, jajaran anggota Dewan Komisioner OJK dan pimpinan industri jasa keuangan.

Friderica menjelaskan;

1. Prioritas Penguatan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan akan dilakukan melalui:
 - a. Pemenuhan modal minimum Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar terbentuk struktur industri jasa keuangan yang kompetitif dan efisien.
 - b. Pengembangan industri keuangan syariah bersama DSN-MUI yang telah membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) serta mendorong *spin-off* bagi LJK yang telah memenuhi kriteria.
 - c. Penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko, termasuk pengelolaan risiko terhadap ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih.
 - d. Penguatan infrastruktur pengawasan dan pelaporan yang berintegritas serta selaras dengan standar internasional, melalui pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) serta menyusun Cetak Biru Penyiapan Ekosistem dalam Memanfaatkan Teknologi dalam Mendukung Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (SupTech).
 - e. OJK bersama *Self-Regulatory Organization* (SRO), pelaku industri dan para *stakeholders* berkomitmen segera melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia dengan membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal melalui delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, yaitu:
 - 1) Kebijakan *free float* dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

- 2) Pengungkapan *Ultimate Beneficial Owner* (UBO).
 - 3) Perluasan pengungkapan tipe investor dan kepemilikan saham dari sebelumnya di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen.
 - 4) Demutualisasi bursa efek.
 - 5) Penegakan peraturan dan sanksi.
 - 6) Peningkatan tata kelola emiten.
 - 7) Pendalaman pasar secara terintegrasi.
 - 8) Kolaborasi dan sinergi dengan seluruh *stakeholders*.
- f. Pengawasan *market conduct* serta langkah *enforcement* secara konsisten, termasuk pemberantasan kejahatan di sektor jasa keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dengan kolaborasi bersama OJK, Kementerian/Lembaga dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), dan pelaku usaha jasa keuangan.
2. Kebijakan prioritas kedua, yaitu Pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan yang Kontributif, melalui:
 - a. Kebijakan deregulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di sektor jasa keuangan melalui persyaratan perizinan usaha yang lebih akomodatif, termasuk simplifikasi proses perizinan.
 - b. Penguatan kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM menjadi lebih terstruktur melalui kewajiban penyusunan rencana bisnis.
 - c. Secara proaktif mendukung Program Prioritas Pemerintah, yaitu:
 - 1) Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), di mana per Desember 2025 telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp149 triliun sebagai pembiayaan awal untuk pembangunan 80 ribu KDKMP di seluruh Indonesia.
 - 2) Pembiayaan ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG), dimana telah disalurkan pembiayaan untuk mendukung ekosistem MBG kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai sebesar Rp1,02 triliun.
 - 3) Penguatan sistem kesehatan nasional dengan sinergi bersama Kementerian Kesehatan dan *stakeholders* terkait melalui penguatan ekosistem asuransi Kesehatan.
 - d. Dukungan program hilirisasi melalui pengembangan ekosistem bulion, dimana transaksi kegiatan usaha bulion tercatat 16.870 kg emas senilai Rp48 triliun. Selain itu, perluasan instrumen berbasis emas seperti ETF emas dan tokenisasi emas juga dikembangkan untuk mempercepat program hilirisasi.
 - e. Kebijakan perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.
 3. Kebijakan prioritas ketiga yaitu Pendalaman Pasar Keuangan dan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan, melalui:
 - a. Peningkatan peran perbankan, asuransi dan dana pensiun terutama yang dimiliki Pemerintah, sebagai investor institusional.

- b. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat (*financial health*) sebagai tujuan akhir.
- c. Dukungan terhadap komitmen Pemerintah untuk Pemerintah terhadap Net Zero Emission (NZE) nasional, melalui:
 - 1) Penyusunan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) v.3 sebagai “versi lengkap” yang didukung dengan *Taxonomy Navigator*.
 - 2) Pengembangan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Sementara itu Airlangga Hartarto menyatakan apresiasi atas berbagai rencana kebijakan OJK dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti pengembangan koperasi desa merah putih, fasilitas likuiditas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga program penguatan literasi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami percaya dengan reformasi yang dilakukan, masa depan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan sangat berkontribusi kepada pertumbuhan,” kata Airlangga.

Airlangga optimistis melalui sinergi antara pemerintah, OJK dan Bank Indonesia, serta industri jasa keuangan, Indonesia bisa menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat kepercayaan masyarakat, kepercayaan pasar, dan dapat selalu menyediakan atau menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Outlook Sektor Jasa Keuangan

Dalam kesempatan PTIJK itu, Friderica menyatakan optimistis tren positif kinerja sektor jasa keuangan di 2026 bisa berlanjut dengan mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang diambil.

Kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 10 - 12 persen, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 7 - 9 persen. Aset program asuransi diperkirakan tumbuh sebesar 5 - 7 persen. Aset Program Dana Pensiun diperkirakan tumbuh 10 - 12 persen dan Aset Program Penjaminan diperkirakan tumbuh 14 -16 persen .

Untuk Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan diproyeksikan tumbuh 6 - 8 persen. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan Rp250 triliun.

Total permintaan skor kredit melalui *Innovative Credit Scoring* diperkirakan mencapai 200 juta permintaan. Nilai transaksi yang disetujui oleh mitra Aggregator diproyeksikan tumbuh hingga Rp27 triliun. Sementara itu, jumlah konsumen aset keuangan digital dan aset kripto (AKD-AK) ditargetkan tumbuh 26 persen.

OJK akan melakukan *review outlook* secara berkala untuk diselaraskan dengan perkembangan pertumbuhan *outlook* ekonomi nasional. Sinergi kebijakan dengan

berbagai pihak baik Pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan dalam mengoptimalkan peran SJK bagi perekonomian nasional.

Laporan Hasil Rapat Dewan Komisioner

Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Januari 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) terjaga stabil di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Lembaga multinasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 diperkirakan masih stagnan dan berada di bawah rata-rata historis. Perkembangan terkini menunjukkan pergerakan ekonomi global bergerak terbatas, seiring melemahnya aktivitas perdagangan dan permintaan. Di sisi lain, risiko geopolitik meningkat seiring eskalasi ketegangan di Iran. Namun demikian, kebijakan moneter global diperkirakan masih bersifat akomodatif.

Di AS, perekonomian masih tumbuh solid dengan tekanan inflasi yang mereda. Tingkat pengangguran turun meskipun pertumbuhan lapangan kerja melambat, tercermin dari realisasi penambahan tenaga kerja Desember 2025 yang lebih rendah dari estimasi. Ke depan, The Fed diperkirakan akan mempertahankan *Fed Fund Rate* (FFR) setidaknya hingga Juni 2026.

Di kawasan Asia, perekonomian Tiongkok tumbuh 5,0 persen *yoy*, sejalan dengan target Pemerintah, didorong oleh surplus neraca perdagangan yang terus meningkat dan mencapai rekor baru. Sementara itu, tekanan di pasar obligasi Jepang semakin meningkat, terutama pada tenor jangka panjang. Dominasi kepemilikan asing pada *Japanese Government Bond* (JGB) jangka panjang meningkatkan kerentanan terhadap risiko *sudden stops* dan *herding*, yang berpotensi menimbulkan rambatan global melalui *repricing* risiko lintas kelas aset.

Dari sisi domestik, kinerja perekonomian terpantau solid. Inflasi *headline* (CPI) meningkat ke level 3,55 persen *yoy* dengan inflasi inti meningkat menjadi 2,45 persen *yoy*. Indeks Keyakinan Konsumen masih berada di zona optimis dan penjualan mobil dan motor mencatatkan kenaikan signifikan menjelang berakhirnya insentif kendaraan listrik. Di sisi penawaran, PMI Manufaktur tercatat semakin ekspansif. Pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan IV sebesar 5,39 persen dan secara tahunan tumbuh 5,11 persen.

Perkembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK)

PASAR MODAL						
Indeks ytd	28-Nov-25	30-Dec-25	30-Jan-26			
IHSG	8508,71	20,18%	8646,94	22,13%	8329,61	-3,67%
LQ45	845,76	2,31%	846,57	2,41%	833,54	-1,54%
IDX80	131,73	9,38%	132,56	10,07%	129,17	-2,56%
ICBI	436,15	11,07%	440,84	12,27%	440,15	-0,16%
NAB (Rp T)*	644,41	29,07%	675,32	35,26%	714,04	5,73%
ARUS DANA MASUK KELUAR						
YTD	2022	2023	2024	Nov'25	Des'25	Jan'25
Saham (Rp T)	60,58	-6,19	16,53	-29,58	-17,34	-9,88
SBN (Rp T)	-129,16	79,87	34,39	-4,48	2,01	-0,10
EBUS Korporasi (Rp T)	0,20	-0,92	-5,53	-1,60	-1,39	-0,64
% Kepemilikan Lokal	54,41	52,91	51,35	56,37	56,14	56,46
Jml Investor (juta)	10,31	12,17	14,87	19,67	20,36	21,07
Market Cap (Rp T)	9.499	11.674	12.336	15.626	15.849	15.046
Rerata Transaksi (Rp T)	14,71	10,75	12,85	17,22	18,07	34,91
PENGHIMPUNAN DANA						
JENIS	s.d. 30 Jan 2026	PIPELINE		SCF (Agregat)***		
	JML	NILAI**	JML	NILAI**	30-Jan-26	
IPO	-	-	11	2,72	Penyelenggarra	18
PUT	-	-	-	-	Penerbit	592
EBUS	2	1,00	5	7,02	Penerbitan Efek	995
PUB EBUS Th I, II, dst.	4	3,00	10	9,59	Pemodal	193.789
TOTAL	6	4,00	26	19,32	Nilai (Rp T)	1,85
CARBON MARKET SUMMARY 26 SEP 2023 - 30 JAN 2026						
Nilai Perdagangan (Rp M)	91,70	Volume Perdagangan (Ton CO2)		1.929,388		
Jml Pengguna Jasa	151	Pasar Regular	Pasar Negosiasi	Pasar Lelang	Pasar Marketplace	
Pendaftar di SRN PP1*	4.738	11,24%	67,93%	20,15%	0,69%	
DERIVATIF KEUANGAN 2 JAN 2026 - 30 JAN 2026						
Volume (lot)	42.068	Pialang Berjangka*	63 Asosiasi*	1		
Frekuensi (x)	224.623	Pemasar Berjangka*	6 Lembaran	1		
Pedagang Penyelenggara SPA*	23	Bank/Penjaminan	15 Penyelenggara	4		
NET SUBSCRIPTION (REDEMPTION) REKSA DANA						
YTD	2022	2023	2024	Nov'25	30-Des'25	29-Jan'26
Reksa Dana (Rp T)	-78,33	22,07	-1,72	114,78	130,19	41,18
ASSET UNDER MANAGEMENT PENGELOLAAN INVESTASI (Rp T)						
Jenis	2023	2024	Nov'25	Des'25	Jan'26*	Ytd (%)
Reksa Dana ¹	484,34	484,56	628,62	658,69	697,04	5,82
KPD ²	278,19	299,54	317,06	325,22	325,22	0,00
RDPT ³	22,54	18,28	19,43	19,52	19,52	0,00
EBA ²	1,60	1,55	3,37	3,90	3,90	0,00
EBA-SP ²	3,17	2,29	1,67	1,56	1,56	0,00
ETF ⁴	17,12	14,71	15,79	16,63	17,00	2,23
DIRE ²	10,33	10,81	11,06	11,32	11,32	0,00
DINFRA ³	7,93	1,98	1,98	1,99	1,99	0,00
KIK PD TAPERA	3,49	3,66	3,90	3,92	3,93	0,21
Total	828,71	837,37	1.002,87	1.042,74	1.081,47	3,71

* Data 29 Jan 2026
** data Jan 2026
*** fully funded (Data SCF yang teradministrasi di KSEI)
1 Data Per September 2025 atau data terakhir
2 Data Des 2025 dan Jan 2026 atau Desember 2026 atau data terakhir
3 Data Per September 2025 atau data terakhir
4 Termasuk EII+ Syariah

*SRN PP1 : Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan

Di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global, pasar saham domestik awal tahun 2026 ditutup pada level 8.329,61 per 30 Januari 2026, turun 3,67 persen secara *mtm* atau *ytd*. Indeks LQ45 dan IDX80 melemah masing-masing sebesar 1,54 persen dan 2,56 persen secara *mtm* atau *ytd*. Rerata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham bulanan pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp34,91 triliun.

Di pasar obligasi, indeks komposit ICBI terkontraksi 0,16 persen *mtm* atau *ytd* ke level 440,15, dengan *yield* SBN rata-rata naik 8,28 bps *mtm* atau *ytd* per 30 Januari 2026. Investor *non-resident* di pasar SBN terpantau membukukan *net sell* sebesar Rp0,10 triliun secara *mtm* atau *ytd*. Sementara di pasar obligasi korporasi, investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp0,64 triliun secara *mtm* atau *ytd*.

Performa yang baik juga terlihat pada industri pengelolaan investasi. Nilai Asset *Under Management* (AUM) mencapai Rp1.081,47 triliun per 29 Januari 2026, meningkat 3,71 persen *mtm* atau *ytd*. Adapun Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada periode yang sama mencapai Rp714,04 triliun, tumbuh 5,73 persen *mtm* atau *ytd*. Tren kinerja NAB yang solid tersebut didukung oleh *net subscription* investor Reksa Dana yang kuat, yaitu mencapai Rp41,18 triliun *mtm* atau *ytd*.

Dari sisi jumlah investor, pada Januari 2026 tercatat penambahan sebanyak 702 ribu investor baru di pasar modal domestik. Dengan perkembangan tersebut, secara *ytd* jumlah investor di pasar modal tumbuh 3,45 persen menjadi 21,07 juta.

Selanjutnya, penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal pada 30 Januari 2026 sebesar Rp4 triliun yang bersumber dari 6 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Adapun pada *pipeline*, terdapat 26 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp19,32 triliun.

Untuk penggalangan dana pada *Securities Crowdfunding* (SCF), pada 28 Januari 2026 terdapat 17 Efek baru dengan nilai dana dihimpun sebesar Rp35,40 miliar, serta terdapat 7 penerbit baru. Dengan demikian secara agregat, telah tercatat 995 penerbitan Efek dari 592 penerbit dan 193.789 pemodal, dengan nilai dana dihimpun mencapai Rp1,85 triliun.

Di pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari 2025 hingga awal tahun 2026, terdapat sebanyak 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK dengan rincian sebagai berikut: 4 penyelenggara pasar berjangka, 23 pedagang penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), 63 pialang berjangka, 15 bank penyimpanan marjin, 6 penasihat berjangka, 1 asosiasi, dan 1 lembaga sertifikasi profesi. Adapun volume transaksi selama Januari 2026 mencapai 42.065 lot atau turun sebesar 31,73 persen secara *mtm* atau *ytd*. Dari sisi frekuensi, terdapat transaksi sebanyak 224.623 kali pada bulan laporan, sehingga secara *mtm* atau *ytd* turun sebesar 6,35 persen.

Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 Januari 2026, secara total tercatat 151 pengguna jasa yang telah terdaftar. Adapun penambahan volume transaksi pada Januari 2026 tercatat sebesar 117.455 tCO₂e, sehingga total volume transaksi mencapai 1.929.388 tCO₂e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp91,70 miliar.

Dalam rangka penegakan hukum di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon:

1. Pada Januari 2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon sebesar Rp3.625.000.000 kepada 3 Pihak, serta menetapkan Tindakan Tertentu kepada 2 Pihak.
2. Sepanjang tahun 2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp3.625.000.000 kepada 3 Pihak serta menetapkan Tindakan Tertentu kepada 2 Pihak.
3. Sepanjang tahun 2026, OJK juga telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp6.273.800.000 kepada 60 Pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Pasar Modal serta mengenakan 25 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis atas selain Keterlambatan Non-Kasus.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)

PERBANKAN					
INTERMEDIASI					PROFITABILITAS
	Des-23	Nov-24	Des-24	Nov-25	Des-25
Kredit (Rp T)	7.090	7,717	7.832	8.315	8.586
% YoY	10,38	10,79	10,46	7,74	9,63
% Ytd	10,38	8,84	10,46	6,17	9,63
% Mtm	1,79	0,79	1,48	1,15	3,26
% Growth YoY					
Kredit Modal Kerja (KMK)	10,05	8,92	8,35	2,04	4,52
Kredit Investasi (KI)	12,26	13,77	13,85	17,98	20,81
Kredit Konsumsi (KK)	9,10	10,94	10,61	6,67	6,58
DPK (Rp T)	8.458	8.836	8.837	9.899	10.059
% YoY	3,73	7,54	4,48	12,03	13,83
% Ytd	3,73	4,47	4,48	12,02	13,83
% Mtm	2,94	0,35	0,02	1,47	1,62
LDR (%)	83,83	87,34	88,62	83,99	85,35
PERMODALAN					
	Des-23	Nov-24	Des-24	Nov-25	Dec-25
CAR (%)	27,65	26,87	26,68	26,05	25,89

RISIKO	Des-23	Nov-24	Des-24	Nov-25	Dec-25
Risiko Kredit					
NPL Gross (%)	2,19	2,19	2,08	2,21	2,05
NPL Net (%)	0,71	0,75	0,74	0,86	0,79
LaR (%)	10,94	9,82	9,27	9,22	8,77
Risiko Pasar					
PDN (%)	1,44	2,31	1,13	1,07	0,91
Risiko Likuiditas					
Alat likuid (Rp T)	2.430	2.260	2.262	2.937	2.874
AL/NCD(%)	127,07	112,94	112,87	131,49	126,15
AL/DPK(%)	28,73	25,57	25,59	29,67	28,57
LCR	220,18	213,07	213,23	210,38	200,97
NSFR*	134,04		128,75		129,06

*data kuartal

Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada Desember 2025, kredit tumbuh sebesar 9,63 persen *yoY* (November 2025: 7,74 persen) menjadi Rp8.586 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 20,81 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 6,58 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja 4,52 persen. Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh sebesar 11,61 persen *yoY*. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,44 persen.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,83 persen *yoY* (November 2025: 12,03 persen *yoY*) menjadi Rp10.059 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 19,13 persen, 14,28 persen, dan 8,19 persen *yoY*.

Likuiditas industri perbankan pada Desember 2025 tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 126,15 persen (November 2025: 131,49 persen) dan 28,57 persen (November 2025: 29,67 persen) dan masih di atas *threshold* masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) berada di level 200,97 persen.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,05 persen (November 2025: 2,21 persen) dan NPL net sebesar 0,79 persen (November 2025: 0,86 persen). *Loan at Risk* (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 8,77 persen (November 2025: 9,22 persen).

Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,53 persen (November 2025: 2,51 persen).

Permodalan (CAR) sebesar 25,89 persen (November 2025: 26,05 persen), menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

Di sisi lain, porsi produk kredit *buy now pay later* (BNPL) perbankan tercatat sebesar 0,31 persen. Per Desember 2025, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh 19,32 persen *yoy* (November 2025: 20,34 persen *yoy*) menjadi Rp26,4 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 31,21 juta (November 2025: 31,47 juta).

Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang Perbankan, OJK mencabut izin usaha PT BPR Suliki Gunung Mas di Provinsi Sumatera Barat, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2026. Selanjutnya, terkait dengan pemberantasan judi *online* yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta Bank untuk melakukan pemblokiran terhadap ±32.144 rekening (*prev: ±31.382 rekening*) dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI, serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan *Enhance Due Diligence* (EDD).

Perkembangan Sektor Perasuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP)

PERASURANSI, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)										
PERASURANSI, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)										
ASURANSI*		PERASURANSI, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)					DANA PENSIUN**			
ASURANSI KOMERSIAL	Dec-23	Dec-24	Nov-24	Nov-25	Dec-25	PROGRAM PENSIUN SUKARELA	Dec-23	Dec-24	Nov-25	
Nilai Aset (Rp T)	891,35	913,32	903,58	971,22	981,05	Nilai Aset (Rp T)	368,54	379,36	405,20	411,29
Growth YoY	1,60%	2,40%	2,71%	7,49%	7,42%	Growth YoY	6,91%	3,75%	4,50%	6,81%
Nilai Premi Asuransi Komersial (Rp T)	320,88	336,65	296,85	297,88	331,72	Nilai luran Program Pensiun Sukarela	39,45	38,62	32,89	38,43
Growth YoY	1,46%	4,91%	2,22%	0,41%	-1,46%	Growth YoY	12,90%	-2,10%	0,52%	16,87%
Premi Asuransi Jiwa (Rp T)	177,41	188,15	165,13	163,88	180,98	Nilai Manfaat Program Pensiun Sukarela	34,53	38,71	35,57	41,99
Growth YoY	-7,93%	6,06%	2,64%	-0,75%	-3,81%	Growth YoY	6,77%	12,10%	13,46%	7,92%
Premi Asuransi Umum dan Reasuransi (Rp T)	143,47	148,5	131,52	134,00	150,74	Jumlah Peserta (Juta Orang)	5,12	5,29	5,25	5,41
Growth YoY	16,22%	3,50%	1,70%	1,88%	1,51%	PROGRAM PENSIUN WAJIB	Dec-23	Dec-24	Nov-25	Dec-25
RBC Asuransi						Nilai Aset (Rp T)	1.036,75	1.125,67	1.121,88	1.256,95
RBC Asuransi Jiwa (%)	457,38	472,55	442,78	486,63	485,90	Growth YoY	12,15%	8,58%	10,74%	12,04%
RBC Asuransi Umum dan Reasuransi (%)	363,1	325,93	321,62	342,88	335,22	Nilai luran Program Pensiun Wajib (Rp T)	105,41	106,91	97,95	104,49
Klaim Asuransi Komersial (Rp T)	228,83	227,75	206,92	197,33	216,70	Growth YoY	7,49%	1,43%	6,54%	6,68%
Growth YoY	-2,43%	-0,47%	-0,44%	-4,64%	-4,85%	Nilai Manfaat Program Pensiun Wajib	62,57	64,39	59,54	67,64
ASURANSI NON KOMERSIAL	Dec-23	Dec-24	Nov-24	Nov-25	Dec-25	Growth YoY	5,08%	2,92%	2,27%	13,61%
Nilai Aset (Rp T)	219,36	220,55	223,35	222,84	220,28	Jumlah Peserta (Juta Orang)	22,90	23,59	23,49	24,44
Growth YoY	3,04%	0,54%	0,15%	-0,23%	-0,12%	PROGRAM TOTAL PROGRAM PENSIUN	Dec-23	Dec-24	Nov-25	Dec-25
Nilai Premi Asuransi Non Komersial (Rp T)	167,14	182,68	166,11	176,83	195,17	Nilai Aset (Rp T)	1.405,45	1.508,21	1.501,25	1.662,16
Growth YoY	5,77%	9,30%	7,60%	6,45%	6,82%	Growth YoY	10,73%	7,31%	3,10%	10,72%
Nilai Klaim Asuransi Non Komersial (Rp T)	166,89	184,09	168,24	182,83	201,52	Jumlah Peserta (Juta Orang)	28,02	28,88	28,74	29,85
Growth YoY	38,83%	10,31%	11,84%	8,67%	3,47%	PERUSAHAAN PENJAMINAN	Dec-23	Dec-24	Nov-25	Dec-25
TOTAL ASSET PROGRAM PERASURAN	Dec-23	Dec-24	Nov-24	Nov-25	Dec-25	Nilai Aset (Rp T)	46,41	46,59	46,68	47,51
Nilai Aset (Rp T)	1.111,30	1.133,87	1.126,93	1.194,06	1.201,33	Growth YoY	18,64%	-0,63%	-0,73%	2,43%
Growth YoY	1,88%	2,03%	2,20%	5,96%	5,95%	Nilai Imbal Jasa Penjaminan (Rp T)	7,92	8,68	8,02	7,38
*Keterangan:										
- Asuransi Komersial: Asuransi Jiwa (Kew+Sys), Asuransi Umum (Kew+Sys), dan Reasuransi (Kew+Sys).										
- Asuransi Non Komersial: Taryan (JKK, JKH), Arabri (JKK, JKH), BPJS Kesehatan (Badan, JKK, JKH, JKP),										
**Keterangan:										
- Program Pensiun Sukarela: Dana Pensiun DPPKPPMP, Dana Pensiun DPPKPPMP, dan Dana Pensiun DPLKPPIP (All Kewajiban).										
- Perusahaan Penjamin: Taryan (HT, AIP), Arabri (HT, AIP), BPJS Kesehatan (HT, JPK).										
- Dana Diklaim: Angka diklaim berdasarkan jumlah peserta HT Taryan, HT, Arabri, dan JHT BPJS Kesehatan.										
- Perusahaan Penjamin: Sukuksa dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta DPK (program penjamin) dan jumlah peserta DPLK (program penjamin dan manfaat lain).										
- Jumlah peserta DPLK (program penjamin dan manfaat lain).										
- Jumlah peserta DPLK (program penjamin dan manfaat lain).										

Pada sektor PPDP, aset industri pada Desember 2025 mencapai Rp1.201,33 triliun atau naik 5,95 persen *yoy* dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.133,87 triliun. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp981,05 triliun atau naik 7,42 persen *yoy*. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Desember 2025 mencapai Rp331,72 triliun, atau terkontraksi 1,46 persen *yoy*, terdiri dari premi asuransi jiwa yang terkontraksi

sebesar 3,81 persen *yoy* dengan nilai sebesar Rp180,98 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 1,51 persen *yoy* dengan nilai sebesar Rp150,74 triliun.

Industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan *Risk Based Capital* (RBC) masing-masing sebesar 485,90 persen dan 335,22 persen (di atas *threshold* sebesar 120 persen).

Untuk asuransi non komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp220,28 triliun atau terkontraksi sebesar 0,12 persen *yoy*.

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Desember 2025 tumbuh sebesar 11,35 persen *yoy* dengan nilai mencapai Rp1.679,46 triliun. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,52 persen *yoy* dengan nilai mencapai Rp411,29 triliun.

Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.268,17 triliun atau tumbuh sebesar 12,66 persen *yoy*.

Pada perusahaan penjaminan, pada Desember 2025 nilai aset tumbuh sebesar 2,43 persen *yoy* menjadi Rp47,51 triliun.

1. Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang PPDP, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Peningkatan ekuitas tahap ke-1 di tahun 2026 sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2023, berdasarkan laporan bulanan per Desember 2025 terdapat 114 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan (79,17 persen) yang telah memenuhi jumlah ekuitas minimum yang dipersyaratkan pada tahun 2026.
2. OJK terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada LJK melalui pengawasan khusus yang sampai dengan 31 Desember 2025 dilakukan terhadap 6 perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya untuk kepentingan pemegang polis. Selain itu juga terdapat 7 Dana Pensiun yang masuk dalam pengawasan khusus.

Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)

IKNB - Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)											
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN						LKM					
	Dec-23	Dec-24	Nov-24	Nov-25	Dec-25	Dec-22	Dec-23	Dec-24	Jun-25	Dec-25	
Piutang Pembiayaan						Penyaluran Pinjaman (Rp T)	0,95	1,01	1,04	1,05	0,96
Nominal (Rp T)	470,86	503,43	501,37	506,82	506,50	Nilai Aset (Rp T)	1,52	1,58	1,69	1,59	1,58
Growth (% <i>yoy</i>)	13,23	6,92	7,27	1,09	0,61	PINJAMAN DARING (PINDAR)					
NPF Gross PP (%)	2,44	2,70	2,71	2,44	2,51	Dec-23	Dec-24	Nov-24	Nov-25	Dec-25	
NPF Net PP (%)	0,64	0,75	0,81	0,85	0,77	Outstanding Pembiayaan (Rp T)	59,64	77,02	75,60	94,85	96,62
Gearing Ratio (x)	2,26	2,31	2,30	2,13	2,18	Growth (% <i>yoy</i>)	16,67	29,14	27,32	25,45	25,44
MODAL VENTURA					TWP 90 (%)	2,93	2,60	2,52	4,33	4,32	
					PERGADAIAN						
Dec-23	Dec-24	Nov-24	Nov-25	Dec-25	Dec-24	Nov-24	Nov-25	Dec-25			
Pembiayaan Modal Ventura (Rp T)	17,34	15,84	16,09	16,29	15,97	Penyaluran (Rp T)	88,05	87,79	125,44	130,37	
Nilai Aset (Rp T)	27,25	26,56	25,92	27,12	27,57	Nilai Aset (Rp T)	106,05	106,06	151,16	157,39	

Di sektor PVML, piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 0,61 persen *yoy* pada Desember 2025 (November 2025: 1,09 persen *yoy*) menjadi Rp506,50 triliun, didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 10,06 persen *yoy*.

Profil risiko Perusahaan Pembiayaan (PP) terjaga dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) *gross* tercatat sebesar 2,51 persen (November 2025: 2,44 persen) dan NPF *net* sebesar 0,77 persen (November 2025: 0,85 persen). *Gearing ratio* PP naik menjadi sebesar 2,18 kali (November 2025: 2,13 kali) dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali.

Pertumbuhan pembiayaan modal ventura di Desember 2025 tumbuh sebesar 0,81 persen *yoy* (November 2025: 1,20 persen *yoy*), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp15,97 triliun.

Pada industri Pinjaman Daring (Pindar), *outstanding* pembiayaan di Desember 2025 tumbuh 25,44 persen *yoy* (November 2025: 25,45 persen *yoy*), dengan nominal sebesar Rp96,62 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 4,32 persen (November 2025: 4,33 persen).

Pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Desember 2025 tumbuh sebesar 48,06 persen *yoy* (November 2025: 42,88 persen *yoy*) menjadi Rp130,37 triliun dengan tingkat risiko kredit yang terjaga. Pembiayaan terbesar industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk Gadai, yaitu sebesar Rp118,73 triliun atau 91,11 persen dari total pembiayaan yang disalurkan industri pergadaian.

Berdasarkan informasi pada SLIK, pembiayaan *Buy Now Pay Later* (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 75,05 persen *yoy* (November 2025: 68,61 persen *yoy*), atau menjadi Rp11,94 triliun dengan NPF *gross* sebesar 2,73 persen (November 2025: 2,78 persen).

Sementara itu, dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor PVML, OJK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada 20 Januari 2026 telah mencabut izin usaha PT Varia Intra Finance karena sampai dengan batas waktu status pengawasan khusus berakhir belum bisa memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang dapat disehatkan.
2. Terdapat 4 dari 144 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 miliar dan 7 dari 95 Penyelenggara Pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Seluruh Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggara Pindar tersebut telah menyampaikan *action plan* kepada OJK yang memuat langkah-langkah penuhan ekuitas minimum, antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya *merger*.
3. Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, selama bulan Januari 2026 OJK telah menerapkan sanksi administratif kepada 22 Perusahaan Pembiayaan, 4 Perusahaan Modal Ventura, 16 Penyelenggara Pindar, 11 Lembaga Keuangan Mikro, 9 Perusahaan Pergadaian, dan 2 Lembaga Keuangan Khusus, atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 58 sanksi denda dan 108 sanksi

peringatan tertulis. Penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi bertujuan mendorong pelaku industri sektor PVML meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)

Perkembangan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)									
Pelaksanaan Regulatory Sandbox Januari 2026						Perizinan Penyelenggara ITSK Januari 2026			
Permohonan Konsultasi	Permohonan Peserta	Peserta Sandbox (On Going)	Lulus	Tidak Lulus	Dalam Proses	Ditolak	PKA	PAJK	Total Pipeline Perizinan
305	27	4	4	1	7	11	10	17	27
Kinerja Penyelenggara ITSK									
Jenis ITSK	Jumlah Penyelenggara ITSK		Total Aset (Rp Miliar)			Jumlah Kemitraan			
	Des'25	Jan'26	Des'24	Nov'25	Des'25	Des'24	Nov'25	Des'25	
PKA	10	10	153,6	475,92	472,49	92 LJK & 21 Lainnya	183 LJK & 93 Lainnya	188 LJK & 89 Lainnya	
PAJK	20	20	99,46	185,25	180,46	599 LJK & 50 Lainnya	743 LJK & 298 Lainnya	756 LJK & 317 Lainnya	
Total	30	30	253,06	661,17	652,95	762	1.317	1.350	
Kinerja Penyelenggara PAJK					Kinerja Penyelenggara PKA				
Transaksi Mitra Penyelenggara PAJK (Rp Miliar)	Nov'25		Des'25	YtD Des'25	Total Hit / Permintaan Data	Nov'25	Des'25	YtD Des'25	
	2.231	2.642	26.756						
Jumlah Pengguna Penyelenggara PAJK (Juta)	16,01	16,44			Skor Kredit PKA (Juta)	17,83	26,26	196,98	
Perdagangan Aset Kripto									
Ekosistem Aset Kripto Januari 2026					Kinerja Perdagangan Aset Kripto				
Daftar Aset Kripto	1.391				Nilai Transaksi (Rp T)	32,68	29,24	482,23	
Penyelenggara Perdagangan	1 Bursa, 1 Kliring, 2 Kustodian, 25 PAKD				Nov'25	Des'25			
Lembaga Penunjang	6 PJP, 2 BPDK				Jumlah Konsumen (Juta)	19,56	20,19		
Proses (Pipeline) Perizinan	2 Bursa, 2 Kliring, 2 Kustodian, 4 CPAKD, 1 PJP				Kapitalisasi Pasar (Rp T)	30,28	23,73		

1. Pelaksanaan *regulatory sandbox*:

- Sejak penerbitan POJK 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK, hingga Januari 2026, OJK telah menerima 305 kali permintaan konsultasi dari calon peserta *sandbox*.
- OJK telah menerima 27 permohonan untuk menjadi peserta *sandbox*, 9 di antaranya telah disetujui untuk menjadi peserta *sandbox*, yang terdiri dari 4 penyelenggara ITSK dengan model bisnis Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang tengah melaksanakan proses uji coba serta 4 peserta *sandbox* yang telah menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan “Lulus”, yaitu atas nama:
 - PT Indonesia Blockchain Persada (Blocktogo) – dinyatakan “Lulus” pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan model bisnis tokenisasi emas (AKD-AK) dengan nama produk Gold Indonesia Republic (GIDR).
 - PT Sejahtera Bersama Nano – dinyatakan “Lulus” pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan model bisnis tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).
 - PT Teknologi Gotong Royong (GORO) – dinyatakan “Lulus” pada tanggal 5 November 2025 dengan model bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan properti. Dalam hal ini, PT Teknologi Gotong Royong bertindak sebagai *platform* perdagangan AKD yang memperdagangkan token GORO.
 - PT Properti Gotong Royong – dinyatakan “Lulus” pada tanggal 5 November 2025 dengan model bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan

properti. Dalam hal ini, PT Properti Gotong Royong bertindak sebagai pemilik dan kustodian atas aset properti yang ditokenisasi melalui *platform* GORO.

Selanjutnya, mengacu pada POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, PT Indonesia Blockchain Persada, PT Sejahtera Bersama Nano, dan PT Teknologi Gotong Royong dapat melakukan pendaftaran kepada OJK. Adapun bagi penyelenggara ITSK dengan model bisnis yang sama dengan 4 peserta *sandbox* yang telah lulus tersebut, mempunyai hak yang sama untuk melakukan pendaftaran ke OJK tanpa melalui uji coba pengembangan *sandbox*.

- c. Saat ini, OJK sedang melakukan proses evaluasi terhadap 7 permohonan untuk menjadi peserta *sandbox* dengan model bisnis AKD-AK.
2. Perizinan penyelenggara ITSK:
 - a. Sampai dengan periode Januari 2026, terdapat 30 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari 10 Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 20 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Sehubungan dengan telah selesainya proses pendaftaran bagi seluruh penyelenggara ITSK dengan model bisnis PKA dan PAJK, maka sesuai POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK, penyelenggara ITSK yang telah mendapat status terdaftar tersebut wajib untuk mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK. Sedangkan bagi calon penyelenggara PKA dan PAJK baru, dapat langsung mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.
 - b. Sampai dengan Januari 2026, terdapat 27 permohonan izin usaha penyelenggara ITSK yang saat ini dalam proses evaluasi oleh OJK, yaitu terdiri dari 10 PKA dan 17 PAJK.

Berdasarkan laporan per Desember 2025, penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK telah berhasil menjalin 1.350 kemitraan (meningkat 77,17 persen *yoy* dibandingkan posisi Desember 2024) dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari berbagai sektor, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, perusahaan sekuritas, pinjaman daring, lembaga keuangan mikro, dan pegadaian, serta dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi dan penyedia sumber data.

Adapun selama bulan Desember 2025, Penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui mitra senilai Rp 2,64 triliun dan telah mencapai total nilai transaksi sebesar Rp 26,76 triliun secara *ytd* sepanjang 2025, dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 16,44 juta pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, jumlah permintaan data skor kredit (total *inquiry/hit*) yang diterima oleh penyelenggara ITSK dengan jenis PKA selama bulan Desember 2025 tercatat mencapai 26,26 juta *hit* dan telah mencapai total *inquiry* data skor kredit sebanyak 196,98 juta *hit* secara *ytd* sepanjang 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran layanan dari penyelenggara ITSK, baik PAJK maupun PKA, telah berkontribusi signifikan meningkatkan aksesibilitas, inklusi, dan kualitas atas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan.

Sehubungan dengan perkembangan aktivitas aset kripto di Indonesia, per Januari 2026 tercatat 1.391 aset kripto yang dapat diperdagangkan. OJK telah menyetujui

perizinan 29 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri dari 1 bursa kripto (bursa), 1 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian (kliring), 2 pengelola tempat penyimpanan (kustodian), dan 25 pedagang aset keuangan digital (PAKD).

Selain itu, OJK juga telah memberikan persetujuan 8 lembaga penunjang, yang terdiri dari 6 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan 2 Bank Penyimpan Dana Konsumen (BPDK). Selanjutnya, OJK saat ini dalam proses evaluasi atas permohonan izin usaha dan/atau persetujuan dari calon penyelenggara perdagangan aset kripto yang terdiri dari 2 bursa, 2 kliring, 2 kustodian, 4 CPAKD, dan 1 PJP.

Jumlah konsumen pedagang aset kripto berada dalam tren meningkat, yaitu mencapai 20,19 juta konsumen pada posisi Desember 2025 (meningkat 3,22 persen dibandingkan posisi November 2025 yang tercatat sebanyak 19,56 juta konsumen). Nilai transaksi aset kripto di sepanjang tahun 2025 telah tercatat senilai Rp482,23 triliun, sementara pada bulan Januari 2026 nilai transaksi tercatat sebesar Rp29,24 triliun. Hal ini menunjukkan kepercayaan konsumen dan kondisi pasar yang tetap terjaga baik.

Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor IAKD, selama bulan Januari 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 7 Penyelenggara ITSK dan 6 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut terdiri dari 9 sanksi denda dengan total nilai sebesar Rp71,2 juta dan 15 sanksi peringatan tertulis. Upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut bertujuan mendorong pelaku industri sektor IAKD meningkatkan aspek tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara optimal.

Perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK)

Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen			
Literasi dan Inklusi Keuangan (1 Januari 2025 sd 31 Januari 2026)			
Edukasi Keuangan	7.130 Kegiatan 10.093.603 Peserta	TPAKD	552 TPAKD Prov/Kab/Kota 100% Prov/Kab/Kota di Indonesia
Skapi Uangmu	373 Konten 3.782.998 Viewers	GENCARKAN	60.690 Jumlah Pelaksanaan Program 339.395.231 Total Peserta / Viewers 37.930 Jumlah Kegiatan Edukasi Langsung 22.760 Jumlah Konten Edukasi Digital
LMSKU OJK	31.004 Akses Modul 18.640 Kelulusan Modul		
Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (1 Januari 2025 sd 19 Januari 2026)			
Layanan Konsumen	573.999 Layanan	Dari 61.869 pengaduan SJK, terdapat:	
Jumlah Pengaduan APPK	61.869 Pengaduan	a. 568 Pengaduan berindikasi pelanggaran b. 4.025 Sengketa yang masuk ke dalam LAPSSJK*	
Perbankan	22.716 Pengaduan		
Fintech	24.125 Pengaduan		
Perusahaan Pembiayaan (PP)	12.392 Pengaduan	Penghentian 2.617 entitas keuangan ilegal oleh Satgas PASTI terdiri dari:*	
Asuransi	1.755 Pengaduan	a. 354 entitas investasi ilegal	
PM dan IKNB lainnya	881 Pengaduan	b. 2.263 entitas pinjaman online ilegal	
Penyelesaian Pengaduan	95,81% Terselesaikan penanganannya melalui internal dispute resolution PUJK 4,19% Sedang dalam proses penyelesaian		

Penegakan Ketentuan Pengawasan Perilaku PUJK dan Pelindungan Konsumen (1 Januari 2025 sd 31 Januari 2026)

	Peringatan Tertulis	Denda	Instruksi Tertulis
Sanksi Penegakan Ketentuan Pelindungan Konsumen	184	43	40
Sanksi Laporan Penilaian Sendiri	6	25	** Sanksi diikuti dengan perintah guna
Sanksi Pengawasan Perilaku PUJK**	19	19	mencegah terulangnya pelanggaran
Sanksi Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan	21	90	serupa.
Penggantian Kerugian Konsumen***	179 PUJK 84,15 Rp M	23.253 USDollar 27.364 Singapore Dollar	
Indonesia Anti-Scam Centre (Nov 2024 s.d. 31 Januari 2026)			
Jumlah Laporan	448.442 Total Laporan 233.006 Laporan ke Pelaku Usaha 215.436 Laporan ke IASC	Rekening Dana (Rp M)	756.006 Rekening Terverifikasi 415.385 Rekening Diblokir 511,08 Dana Korban yang Diblokir

*Data 1 Januari 2025 sd 31 Januari 2026 ***Data 1 Januari 2025 sd 18 Januari 2026

Sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026, OJK telah menyelenggarakan 7.130 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 10.093.603 peserta. *Platform* digital Sikapi Uangmu, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi khusus untuk konten edukasi keuangan kepada masyarakat melalui *minisite* dan aplikasi, telah menerbitkan 373 konten edukasi, dengan total 3.782.998 *viewers*. Selain itu, terdapat 44.134 pengguna *Learning Management System Edukasi Keuangan* (LMSKU), dengan total akses modul sebanyak 31.004 kali dan penerbitan 18.640 sertifikat kelulusan modul.

Pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2026 telah diselenggarakan implementasi program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) melalui penyelenggaraan 60.690 program yang telah menjangkau 339,3 juta peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut terdiri atas Edukasi Keuangan secara langsung sebanyak 37.930 kegiatan serta Edukasi Keuangan Digital sebanyak 22.760 konten. Adapun untuk wilayah pelaksanaan GENCARKAN telah menjangkau 505 dari 514 atau 98,24 persen Kabupaten/Kota di Indonesia.

Upaya peningkatan literasi keuangan tersebut didukung oleh penguatan program inklusi keuangan melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). OJK bersama Kementerian Dalam Negeri dan *stakeholders* terkait telah berhasil mendorong pembentukan TPAKD secara penuh di seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan pengembangan serta penguatan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, telah dilakukan beberapa inisiatif selama Januari 2026 sebagai berikut:

1. Kegiatan edukasi keuangan di SMA Taruna Nusantara Magelang pada 6 Januari 2026 dengan tema “Literasi Keuangan Kuat, Indonesia Hebat: Siswa SMA Taruna Nusantara Menuju Generasi Emas 2045”. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan dihadiri sekitar 900 siswa dan siswi serta pengajar SMA Taruna Nusantara Magelang.
2. Kegiatan *Capacity Building* TPAKD Provinsi DKI Jakarta pada 29 Januari 2026 yang dihadiri oleh OJK, Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri guna menyelaraskan arah kebijakan dengan *Roadmap* TPAKD 2026–2030. Penetapan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai Indikator Kinerja Daerah serta penyelarasan sub-kegiatan pemerintah daerah dilakukan guna memastikan sinkronisasi target kinerja, sekaligus mengakselerasi program strategis khususnya pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah Kepulauan Seribu dan digitalisasi sektor ekonomi unggulan.

3. Sosialisasi dan *refreshment* program KEJAR kepada Bank Umum di Jakarta pada 29 Januari 2026 dan secara virtual kepada BPD serta BPR/S pada 30 Januari 2026. Kegiatan dimaksud mencakup evaluasi implementasi program KEJAR tahun 2025 dan rencana implementasi program KEJAR tahun 2026, *sharing session* pelaksanaan program KEJAR oleh pemenang KEJAR Award 2025, dan *coaching* serta simulasi pelaporan program KEJAR.
4. Sosialisasi Penyampaian Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) pada 13 Januari 2026 secara virtual kepada seluruh PUJK dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan dan pelaporan Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan.

Rekapitulasi Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Sendiri Tahun 2025

Sektor	Jumlah PUJK	Tepat Waktu		Terlambat		Tidak Menyampaian	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perbankan (PBKN)	1.603	1.588	99,06%	15	0,94%	0	0,00%
Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK)	311	279	89,71%	21	6,75%	11	3,54%
Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP)	355	353	99,44%	1	0,28%	1	0,28%
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)	509	490	96,27%	9	1,77%	10	1,96%
Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) Serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD)	24	21	87,50%	2	8,33%	1	4,17%
Total	2.802	2.731	97,47%	48	1,71%	23	0,82%

Dalam rangka memastikan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan pelindungan konsumen, OJK secara aktif melakukan penegakan ketentuan pengawasan perilaku PUJK (*market conduct*) dan pelindungan konsumen, antara lain:

1. Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri tahun 2024 dan tahun 2025 sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di SJK, sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2026, OJK telah mengenakan 6 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 25 Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp562,15 juta yang terdiri dari sanksi administratif keterlambatan pelaporan, tidak disampaikannya laporan, dan tetap tidak disampaikannya laporan setelah dinyatakan tidak menyampaikan. Adapun PUJK yang telah dinyatakan tidak menyampaikan laporan tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan penilaian sendiri.
2. Berdasarkan hasil pengawasan *market conduct* baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2026, OJK telah mengenakan sejumlah 19 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 19 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp3,82 miliar atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan klaim asuransi. Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk menghapus iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyesuaikan kebijakan, serta pembayaran klaim konsumen sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat.
3. Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan terkait dengan kegiatan literasi dan kegiatan inklusi keuangan sebagaimana diatur dalam POJK 22

Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di SJK, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan dan/atau tidak disampaikannya laporan realisasi literasi dan inklusi Semester II tahun 2024, laporan rencana literasi dan inklusi tahun 2025, serta laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan Semester I tahun 2025. Sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2026, OJK telah mengenakan sejumlah 111 sanksi administratif yang terdiri dari 21 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 90 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp6,1 miliar.

4. Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, OJK telah memberikan perintah dan/atau sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. 184 peringatan tertulis kepada 149 PUJK; 40 instruksi tertulis kepada 40 PUJK; dan 43 sanksi denda kepada 40 PUJK selama periode 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026.
 - b. Selain itu, terdapat 179 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.071 pengaduan dengan total pengembalian kerugian Rp84,15 Miliar, USD 23,253.02, dan SGD 27,364.53 selama periode 1 Januari 2025 hingga 18 Januari 2026.

Dari aspek layanan konsumen, sejak 1 Januari 2025 hingga 19 Januari 2026 telah menerima 573.999 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 61.869 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut, 22.716 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 24.125 dari industri *financial technology*, 12.392 dari perusahaan pembiayaan, 1.755 dari perusahaan asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya.

Dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026, OJK telah menerima 29.828 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 24.281 pengaduan mengenai pinjaman *online* ilegal dan 5.547 pengaduan terkait investasi ilegal. Adapun jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan/diblokir adalah sebagai berikut:

Entitas	Tahun								Jumlah
	2017 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	1 Jan 2025 s.d 31 Jan 2026	
Investasi Ilegal	185	442	347	98	106	40	310	354	1.882
Pinjol Ilegal	404	1.493	1.026	811	698	2.248	2.930	2.263	11.873
Gadai Ilegal	0	68	75	17	91	0	0	0	251
Total	589	2.003	1.448	926	895	2.288	3.240	2.617	14.006

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026, OJK telah:

- a. menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjaman *online* ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

- b. Satgas PASTI juga menemukan nomor kontak pihak penagih (*debt collector*) pinjaman *online* ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.706 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan. Sejak awal beroperasi sampai dengan 31 Januari 2026, IASC telah menerima 448.442 laporan. Jumlah rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 756.006 dan dari jumlah rekening tersebut sejumlah 415.385 telah dilakukan pemblokiran. Adapun jumlah dana korban yang telah diblokir sebesar Rp511,08 miliar dimana sebanyak Rp161 miliar telah dikembalikan kepada korban. Selanjutnya, OJK juga telah bekerja sama dengan anggota Satgas PASTI dalam rangka penegakan hukum pidananya. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.

Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

PASAR MODAL SYARIAH				SJK SYARIAH			
	Jan-25	Des-24	Dec-25	Jan-26		PPDP SYARIAH	
Saham Syariah							
ISI	211,82	215,65	308,61	297,73			
%ytd	↓ -1,78% ↗	↑ 1,41% ↗	↑ 43,11% ↓	↓ -3,53%			
market cap (Rp T)	6.718,24	6.825,31	8.971,68	8.546,91			
Jumlah saham	679	616	631	631			
%market share (kapitalisasi)	54,60	55,33	56,72	56,91			
Sukuk							
Sukuk Negara (Rp T)	1.633,81	1.626,42	1.703,60	1.703,60			
Sukuk Korporasi (outstanding Rp T)	54,68	55,27	88,21	88,90			
%market share Sukuk korporasi	11,52	11,63	16,44	16,52			
Reksa Dana (RD) Syariah							
AUM RD Syariah (Rp T)	51,74	50,55	83,44	91,04			
%market share RD Syariah	10,42	10,12	12,36	12,75			
Securities Crowdfunding Syariah							
Dana Dihimpun (Rp M)	745,07	715,47	1.041,64	1.070,14			
%market share SCF Syariah	52,91	52,50	57,43	57,72			
PERBANKAN SYARIAH				PVML SYARIAH			
	Dec-24	Oct-25	Nov-25	Des-25		Nov-24	Dec-24
Aset (Rp T)	980,30	1028,18	1035,05	1067,73	ASET (nominal dalam Rp T)	Nov-24	Dec-24
% Market share	7,72	7,64	7,59	7,69%	Asuransi Jiwa Syariah	33,75	34,20
Pembentukan (Rp T)	643,55	685,55	690,21	705,22	Asuransi Umum Syariah	9,37	9,46
% YoY	9,92	7,78	7,67	9,58	Reasuransi Syariah	3,12	2,89
DPK (Rp T)	753,60	820,79	819,14	829,99	DPPK-PPMP Syariah	1,76	1,82
% YoY	10,09	14,26	13,34	10,14	DPPK-PPMP Syariah (termasuk UUS)	1,01	1,00
FDR BUS-UUS (%)	84,77	82,85	83,63	84,37	DPLK Syariah	1,68	1,71
CAR (%) BUS	25,4	24,57	24,59	25,07	Penjaminan Syariah	6,36	6,28
ROA BUS-UUS (%)	2,04	1,97	1,97	1,98	%Market Share PDDP Syariah (aset)	2,12	2,12
Risiko Pembiayaan					Intermediasi (nominal dalam Rp T)	Nov-24	Dec-24
NPF Gross BUS-UUS (%)	2,12	2,23	2,26	2,16	Kontribusi asuransi syariah	24,66	30,32
NPF Net BUS-UUS (%)	0,79	0,9	0,89	0,83	% YoY	8,42%	21,07%
Likuiditas					Iuran Dana Pensiun	0,40	0,55
AL/NCD BUS(%)	154,52	147,35	140,6	142,13	% YoY	-	0,18
AL/DPK BUS(%)	32,09	30,41	29,19	30,01	Imbal Jasa Kafalah	0,76	0,84
					% YoY	-	0,03
					* Nilai Iuran Dana Pensiun disesuaikan dengan menghitung iuran jatuh tempo		3,78
							20,00
							20,39

Data LKM Syariah TW III merupakan data laporan empat bulanan

Data SCF Syariah merupakan total penerbitan SCF Syariah

Data Sukuk Negara November 2025 masih tersedia per tanggal 31 Oktober 2025 (sumber: website DJPR)

Data LKM Syariah Maret 2025 merupakan data laporan empat bulanan periode Desember 2024.

Data Sukuk Negara Juli 2025 masih tersedia per 30 Juli 2025

Pada industri keuangan syariah, indeks saham syariah (ISSI) menurun -3,53 persen *ytd* dan *Asset Under Management* (AUM) Reksa Dana Syariah tumbuh 9,12 persen *ytd* menjadi Rp91,04 triliun. Sementara itu, secara *yoY*, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,58 persen, kontribusi asuransi syariah terkontraksi 0,17 persen dan piutang pembiayaan syariah meningkat 12,43 persen.

Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, 41 perusahaan telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), dimana 27 perusahaan menyatakan akan melakukan *spin-off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan 14 perusahaan akan mengalihkan portofolio

kepada perusahaan lain. Pada tahun 2025 terdapat 1 perusahaan yang melakukan *spin off* unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru dan baru dilaksanakan *launching* pada 26 Januari 2026. Adapun saat ini, sedang berjalan proses 4 unit syariah yang melakukan *spin off* dengan pendirian perusahaan baru dan 4 perusahaan akan mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan lain.

Penguatan Tata Kelola

OJK senantiasa melakukan langkah penguatan integritas dan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan, antara lain:

1. OJK menerapkan pelaporan *Risk In Focus* secara berkala untuk memastikan efektifitas pengelolaan risiko-risiko utama yang memiliki dampak besar bagi organisasi. *Risk In Focus* merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka menjamin layanan terbaik dari seluruh lini tugas dan fungsi OJK kepada masyarakat.
2. OJK terus memperkuat fungsi manajemen risiko dengan berfokus pada identifikasi risiko utama, perencanaan dan monitoring mitigasi yang lebih baik, serta dukungan *tools* dan pelaporan yang tepat guna mendukung pengambilan keputusan strategis. Setiap tahun, OJK melakukan pengkinian Profil Risiko dengan menggunakan sistem pelaksanaan manajemen risiko secara terintegrasi dan menyeluruh.
3. OJK juga terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan asosiasi profesi di bidang GRC antara lain melalui kegiatan *Town Hall Meeting* yang diadakan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, OJK mendorong penguatan profesi internal auditor di Sektor Jasa Keuangan dalam merespon risiko utama dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Penegakan Ketentuan di SJK dan Perkembangan Penyidikan

OJK memperkuat upaya penegakan ketentuan di sektor jasa keuangan dengan menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan. Sepanjang 2025, OJK telah menetapkan sekitar 3.888 sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (2024: 4.066 sanksi administratif). Diharapkan langkah penegakan ketentuan yang dilakukan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan integritas sektor jasa keuangan secara berkelanjutan.

Sektor	Total Sanksi Administratif		Pencabutan Izin/Pembatalan Pendaftaran		Pembekuan Izin/Usaha		Sanksi Administratif berupa Denda				Peringatan Tertulis		Perintah Tertulis	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	Jml	Rp M				
													2024	2025
PMDK	1	1.096	3	6	1	-	841	146,12	762	131,429	145	323	21	5
PPDP	1.325	784	-	2	7	3	410	2	281	6	908	498	-	-
PVML	1.873	1.541	10	6	27	16	564	3	589	4	1.272	930	-	-
IAKD	42	72			-		-	-	33	1	10	39	32	
PEPK	825	395	-	-	-	-	447	17	178	12	378	217	-	-
Total	4.066	3.888	13	14	35	19	2.262	22	1.843	23	2.713	2.007	53	5

Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, sampai dengan 31 Januari 2026, Penyidik OJK telah menyelesaikan total 178 perkara yang terdiri dari 140 perkara PBKN, 9 perkara PMDK, 24 perkara PPDP dan 5 perkara PVML. Selanjutnya jumlah perkara yang telah diputus pengadilan sebanyak 142 perkara diantaranya 140 perkara telah

mempunyai ketetapan hukum tetap (in kracht) dan 2 perkara masih dalam tahap kasasi. Penyidik OJK berkoordinasi secara aktif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain dalam penyelesaian proses penyidikan melalui kerjasama dalam penegakan hukum SJK.

No	Tahap	PBKN	PMDK	PPDP	PVML	Jumlah
1	Proses Telaahan	13	6	2	2	23
2	Penyelidikan	2	2	2	1	7
3	Penyidikan	7	4	0	1	12
4	Berkas	5	0	1	0	6
5	P-21	140	9	24	5	178

1	Putusan Pengadilan In Kracht	115	5	19	1	140
2	Banding	0	0	0	0	0
3	Kasasi	0	0	2	0	2
Total						142

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi;
Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id